



News Title : Regulasi untuk Pedagang Kripto Diperketat, Izin Pendaftaran Paling Lambat 16 Oktober 2024

Media Name : Tribunnews.com

Journalist : Namira Yunia Lestanti

Publish Date : 24 August 2024

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 3,000,000

Resources : Kasan (Kepala Bappebti), Yudhono Rawis (Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI))

Ads Value : 1,000,000

Section/Rubrication : Bisnis

Topic : Kripto

Regulasi untuk Pedagang Kripto Diperketat, Izin Pendaftaran Paling Lambat 16 Oktober 2024

Tayang Sabtu, 24 Agustus 2024 09:29 WIB

Penulis: Namira Yunia Lestanti

Editor: Chandra Ardiya



Baca: Pedagang Kripto Berjangka Komoditi (Bappebti) memperketat peraturan baru yang memperpendek waktu pendaftaran pedagang aset kripto di Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali mengeluarkan peraturan baru yang memperpendek regulasi di sektor perdagangan aset kripto di Indonesia.

Level peraturan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Uang Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, Bappebti mengkaji calon Pedagang Uang Aset Kripto (CPFAK) untuk memastikan kepastian dan mendapatkan izin sebagai Pedagang Uang Aset Kripto (PUAK) yang sah, paling lambat pada tanggal 16 Oktober 2024.

Aturan baru ini berlaku untuk CPFAK yang telah memiliki bukti daftar untuk mengikuti permohonan persetujuan sebagai PUAK Kripto Bappebti, paling lambat satu bulan setelah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Apabila CPFAK tidak kunjung memenuhi syarat atau gagal mendapatkan persetujuan Badan Bursa waktu yang telah ditetapkan, maka tanda daftar mereka akan dibatalkan dan tidak berlaku lagi.

Syarat yang harus dipenuhi Pedagang Kripto untuk mendapatkan CPFAK diantaranya harus memiliki Surat Persetujuan Anggita Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggita Reling (SPAR), modal minimum sebesar Rp100 miliar, serta mengikuti program Asil Persetujuan Uang, Pengawasan Perdagangan Terakumulasi (APU-PTT), dan Pencapaian Profesional sebagai Pemenuhan Kebutuhan.

Baca juga: [Bursa juga: Bursa tenaga kerja tambah untuk sistem? Cat di sini!](#)

Selain itu, perusahaan harus memiliki karyawan yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) dan memiliki Risiko Ekonomi Canggih (RISC), sehingga juga diwajibkan memiliki sertifikasi ISO 27001 dan Information Security Management System dan ISO 27002 (Risk Security).



Kepala Bappebti, Kasan, mengungkapkan peraturan baru ini diharapkan untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha di industri kripto di Indonesia beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan bagi Indonesia bisa melakukan eksplorasi perdagangan kripto yang sah dan berkualitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat mendorong transaksi.

"Bappebti memberikan waktu yang cukup bagi para calon pedagang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan," ujar Kasan mengutip dari siaran resminya.

"Peraturan ini bukan hanya untuk melindungi investor, tetapi juga untuk memastikan eksistensi perdagangan kripto yang sah dan berkualitas di Indonesia," tambahnya.

Baca juga: [DPR Luncurkan Peta Jalan RENCANA untuk Pengembangan Keuangan Digital dan Aset Kripto](#)

Bappebti mencatat sejauh ini baru dua perusahaan yang sudah mendapatkan izin PUAK, sementara 13 CPFAK yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Anggita Bursa (SPAB) sedang berproses mendapatkan persetujuan menjadi PUAK.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) Yudhono Rawis menilai peraturan baru Bappebti akan membantu meningkatkan pasar yang sah, dan berkontribusi untuk memastikan regulasi, sehingga mendapatkan pasar yang lebih stabil dan aman bagi semua pihak.

Selain melindungi investor dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak bertanggung jawab, pengetahuan regulasi juga memungkinkan industri di sektor kripto.

Baca juga: [Penjualan Kripto Berakumulasi Bilangan Invenstasi Mekanik, Warga Australia Mengalir Rp 12,6 Triliun](#)

Lantaran harga pasar yang memiliki nilai jangka panjang dan kombinasi kuat terhadap transparansi serta kapabilitas yang akan membantu di industri ini, hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri kripto Indonesia di kancah global.

"Kami mendukung penuh langkah Bappebti ini karena dapat meningkatkan kredibilitas industri kripto di Indonesia. Ini juga memberikan kapabilitas bagi investor bahwa mereka bertanggung jawab di pasar yang sesuai dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Yudho.

Baca juga: [Investor Baru Aset Kripto di Indonesia Tumbuh 400 Ribu Salip Bulet](#)

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, seluruh pelaku usaha di industri kripto diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan memastikan kepastian yang telah ditetapkan.

Hal ini penting untuk menjaga reputasi pasar publik terhadap industri kripto di Indonesia, yang semakin berkembang pesat.

"Ya, memang, kami optimis Indonesia dapat menjadi salah satu pasar utama dalam industri kripto global, dengan didukung oleh regulasi yang kuat dan industri yang solid," kata Yudho.